

**PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI
BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) POLRI**

Disusun Oleh:

NAMA : TRI SETIANINGSIH
NPM : 2344021022
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

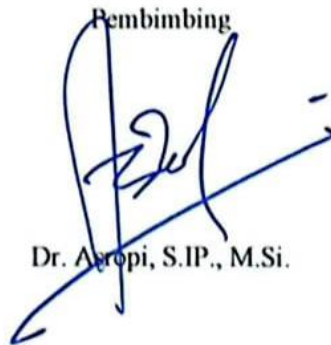
PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Tri Setianingsih
NPM : 2344021022
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis (Bahasa Indonesia): Penyusunan Skema Sertifikasi Bhayangkara Pembina
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
Polri
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Drafting of the Certification Scheme for The Security And
Public Order Advisor (Bhabinkamtibmas) Indonesian
National Police*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing



Dr. Asropi, S.IP., M.Si.

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Tri Setianingsih
Npm : 234401022
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
JUDUL TESIS : Penyusunan Skema Sertifikasi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 November 2024
Pukul : 15.00 s.d.16.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS UJIAN TESIS

Ketua Sidang : Dr. Ridwan Rajab, M.Si.

Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si.

Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA. :

Pembimbing : Dr. Asropi, S.IP., M.Si.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Tri Setianingsih
NPM : 2344021022
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul “Penyusunan Skema Sertifikasi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri” adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penulisan tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab serta menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, November 2024

Pembuat Pernyataan,



Tri Setianingsih

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, ridho dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Tesis ini disusun dan diajukan guna melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai derajat Pascasarjana pada Program Studi Magister Terapan Administrasi Publik Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari segala sisi dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing, baik langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya tesis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Asropi, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran mulai dari awal penyusunan hingga terselesainya tesis ini.
2. Tim Penguji Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si. Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si., dan Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A. yang pada sidang tesis telah memberikan saran dan masukan yang berharga untuk penyempurnaan tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A, selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama peneliti menjalani perkuliahan sampai menyelesaikan perkuliahan di Politeknik STIA LAN Jakarta.
4. Suami terkasih, Rino Rizkyan Diego, S.H. dan putra putri kesayangan, Muhammad Kautsar Alfarizky, Nada Ayudia Sheza Rafanda, dan Muhammad Althaf Ghifary yang selalu memberikan *support*, mendoakan dan memotivasi baik moril maupun spiritual selama menjalankan perkuliahan sampai menyelesaikan tesis ini.

5. Adik kebanggaan, Rahmat Hidayat dan seluruh keluarga besar Bapak Karno dan Keluarga besar Bapak Frans Annakotapary yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan tidak henti-hentinya mendoakan peneliti mulai dari awal menjalani perkuliahan hingga terselesainya tesis ini, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, berkah dan pahala yang melimpah.
6. Seluruh Pimpinan dan staf Korbinmas Baharkam Polri, terima kasih atas dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian.
7. Seluruh staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan dan Pegawai Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan dukungannya dalam melayani peneliti dan mahasiswa yang lainnya;
8. Teman-teman kelas AA MSDA angkatan 2023 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang sangat besar selama studi, kenangan yang tidak dapat dilupakan, semoga tetap menjaga tali silaturahmi.

Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Hanya doa yang dapat peneliti panjatkan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta perhatian yang tidak henti kepada peneliti.

Akhir kata, peneliti mohon maaf jika ada kata maupun tindakan yang kurang berkenan dalam penyusunan tesis ini dan semoga tesis ini memberikan sumbang pemikiran dalam dunia akademis serta dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, November 2024

Peneliti



Tri Setianingsih

ABSTRAK

PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) POLRI

Tri Setianingsih, Asropi
2344021022@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merancang skema sertifikasi bagi Bhabinkamtibmas dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja di lapangan. Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa atau kelurahan, yang memerlukan standar kompetensi yang jelas dan terukur. Namun, evaluasi kinerja menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi serta kurangnya pengakuan formal terhadap kemampuan mereka, yang berdampak pada kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) dan telaah dokumen. FGD melibatkan beberapa pihak dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri, dan Subdit Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi berfungsi sebagai mekanisme formal yang dapat mengukur dan meningkatkan kompetensi Bhabinkamtibmas, serta menjadi dasar bagi pengembangan karier Bhabinkamtibmas. Skema sertifikasi yang dirancang mencakup latar belakang, ruang lingkup, rincian unit kompetensi, serta prosedur penilaian yang komprehensif. Implementasi sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme Bhabinkamtibmas, memperkuat legitimasi Polri dalam pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat. Penelitian ini memperkuat pentingnya sertifikasi sebagai alat untuk mendukung program pengembangan SDM Polri unggul di era Kepolisian 4.0, sesuai dengan rencana strategis institusi Kepolisian.

Kata kunci : Sertifikasi, Kompetensi, Bhabinkamtibmas, Pengembangan SDM, Polri, Profesionalisme, Kepercayaan Publik.

ABSTRACT

DRAFTING OF THE CERTIFICATION SCHEME FOR THE SECURITY AND PUBLIC ORDER ADVISOR (BHABINKAMTIBMAS) INDONESIAN NATIONAL POLICE

Tri Setianingsih, Asropi
2344021022@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to design a certification scheme for Bhabinkamtibmas to enhance their competence and performance in the field. Bhabinkamtibmas plays a crucial role in maintaining security and order at the village or sub-district level, which requires clear and measurable competency standards. However, performance evaluations reveal competency gaps and a lack of formal recognition of their abilities, affecting public trust. This qualitative research employs data collection methods including Focus Group Discussions (FGD) and document reviews, involving experts from the National Professional Certification Agency (BNSP), the Professional Certification Body (LSP) of the Indonesian National Police, and the Subdirector of Bhabinkamtibmas at Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri. The findings indicate that certification functions as a formal mechanism to assess and improve Bhabinkamtibmas' competencies and serves as a foundation for career development. The designed certification scheme includes background, scope, detailed competency units, and comprehensive assessment procedures. The implementation of this certification is expected to enhance the professionalism of Bhabinkamtibmas, strengthen the legitimacy of the police in public service, and build public trust. This study underscores the importance of certification as a tool to support the development of superior human resources within the Indonesian National Police in the era of Policing 4.0, aligned with the institution's strategic plans.

Keywords : *Certification, Competence, Bhabinkamtibmas, Human Resource Development, Indonesian National Police, Professionalism, Public Trust.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Rumusan Permasalahan	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan Kebijakan Dan Teoritis	23
C. Kerangka Berpikir	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
A. Metode Penelitian	46
B. Teknik Pengumpulan Data.....	46
C. Prosedur Pengolahan Dan Analisis Data.....	48
D. Instrumen Penelitian.....	49

E. Validasi Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	52
A. Gambaran Umum Korbinmas Baharkam Polri	52
B. penyajian Data dan Pembahasan	56
1. Pengumpulan Data Melalui Wawancara	56
2. Penyajian Hasil Pengolahan Data Hasil FGD	63
3. Review Draft Skema Sertifikasi	77
4. Pengesahan Pengesahan dan Penyerahan Draft Skema Sertifikasi Bhabinkamtibmas ke LSP Polri	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
Daftar Pustaka	89
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target Kinerja Bhabinkamtibmas	3
-----------	--------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perbandingan Jumlah Bhabinkamtibmas dengan Desa/Kelurahan	7
Gambar 1.2	Pendidikan Umum Bhabinkamtibmas	8
Gambar 1.3	Program Pendidikan dan Pelatihan Bhabinkamtibmas	9
Gambar 1.4	Tunjangan Khusus Bhabinkamtibmas	10
Gambar 2.1	unsur-unsur skema sertifikasi BNSP	44
Gambar 2.2	Kerangka Berfikir.....	45

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Ijin Penelitian
2. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian
3. Transkrip *Focus Group Discussion* (FGD)
4. Dokumentasi
5. Skema Sertifikasi Bhabinkamtibmas
6. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan komponen yang sangat penting. Stabilitas dan ketertiban di seluruh negeri dijaga oleh Polri, sebuah lembaga yang memiliki tugas dan kewajiban yang sangat strategis. Tujuan keberadaan Polri menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah untuk menjamin keamanan dalam negeri. Tugasnya meliputi menegakkan hukum dan peraturan, memelihara perdamaian, melindungi warga negara, dan menyelenggarakan berbagai layanan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut Sumber Daya Manusia (SDM) Polri tentu memiliki peran penting, *tagline* yang digaungkan dalam program prioritas Kapolri, salahsatunya adalah mewujudkan SDM Polri Unggul di Era Kepolisian 4.0 yang menitikberatkan pada kemampuan SDM Polri dalam beradaptasi menghadapi revolusi industri keempat. Tentunya, peningkatan SDM Polri yang kompeten pada bidangnya menjadi hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Tanggung jawab membina dan memelihara keamanan dan ketertiban umum di desa, kelurahan, atau tempat sejenisnya berada di tangan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Keterbitan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021. Bhabinkamtibmas aktif berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk membina hubungan baik antara masyarakat dan Kepolisian.

Keputusan Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri nomor : Kep/9/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Bhabinkamtibmas dan sudah disahkan juga dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Vokasi dan Produktifitas Nomor 2/1007/LP.00.00/V/2024 Tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Bhabinkamtibmas menyebutkan daftar unit kompetensi personel Bhabinkamtibmas adalah :

1. Membina dan Melatih Satkamling;
2. Melakukan Tugas dan Perbantuan Terhadap Bencana;
3. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh) kepada Masyarakat;
4. Melaksanakan Kegiatan Sambang;
5. Membantu Satuan Fungsi Lain dalam Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
6. Melaksanakan Deteksi Dini Terhadap Potensi Gangguan Kamtibmas;
7. Melaksanakan *Problem Solving*.

Dari uraian SK3 Bhabinkamtibmas tersebut terlihat besarnya peran Bhabinkamtibmas sebagai perwakilan Polri dalam melayani masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan dari keberadaan Polri. Hal tersebut haruslah didukung oleh sumber daya manusia Polri yang kompeten. Upaya Korbinmas Baharkam Polri dalam meningkatkan kompetensi Bhabinkamtibmas menuju SDM unggul dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan latihan seperti Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes), Program Pelatihan Polri (Prolat) baik di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat Kepolisian Daerah serta memberikan pelatihan Peningkatan Kemampuan (Katpuan). Masih terdapat permasalahan terkait kapasitas anggota Polri, meskipun telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi melalui berbagai program pelatihan. Berdasarkan

Rencana Strategis Polri 2020–2024, salah satu kelemahan organisasi adalah kurangnya kompetensi lapangan di kalangan anggota Polri.

Selain hal tersebut kesenjangan kompetensi Bhabinkamtibmas juga tertuang dalam laporan temuan Wasrik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pada Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Efektifitas Pemolisian dan Masyarakat tahun 2022 s.d Triwulan III tahun 2024 menyebutkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan Bhabinkamtibmas secara uji petik di Polresta Mataram, Polres Lombok Barat, Polres Lombok Timur, dan Polres Lombok Tengah pada Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan kompetensi Bhabinkamtibmas tidak terukur dan terstandar dengan kompetensi yang diharapkan. Hal ini dikuatkan pula dari hasil analisa dan evaluasi kinerja Bhabinkamtibmas periode januari 2024 masih belum sesuai target yang diharapkan.

Tabel 1.1
Target Kinerja Bhabinkamtibmas

NO	POLDA	JML BHABIN	DDS Min. 5 Giat (5 rumah)/hari * 30 Hari			DETEKSI DINI Min. 1 Laporan/hari * 30 Hari			PROBLEM SOLVING 1	PROBLEM SOLVING 2	JUMLAH GIAT
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%			
1	ACEH	1548	232200	10001	4%	46440	2228	5%	27	431	12687
2	SUMUT	1395	209250	10473	5%	41850	7690	18%	55	11	18229
3	SUMBAR	898	134700	3018	2%	26940	927	3%	11	1	3957
4	RIAU	1167	175050	17442	10%	35010	839	2%	29	47	18357
5	JAMBI	536	80400	41070	51%	16080	577	4%	19	48	41714
6	SUMSEL	1388	208200	49145	24%	41640	11330	27%	29	32	60536
7	BENGKULU	435	65250	5340	8%	13050	25	0%	2	1	5368
8	LAMPUNG	1485	222750	138431	62%	44550	12299	28%	69	2207	153006
9	BABEL	393	58950	13056	22%	11790	249	2%	6	4	13315
10	KEPRI	258	38700	13506	35%	7740	1711	22%	11	8	15236
11	METRO JAYA	908	136200	41959	31%	27240	4003	15%	185	508	46655
12	JABAR	4182	627300	315259	50%	125460	12825	10%	208	707	328999

NO	POLDA	JML BHABIN	DDS Min. 5 Giat (5 rumah)/hari * 30 Hari			DETEKSI DINI Min. 1 Laporan/hari * 30 Hari			PROBLEM SOLVING 1	PROBLEM SOLVING 2	JUMLAH GIAT
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%			
13	JATENG	4492	673800	191114	28%	134760	56227	42%	16	176	247533
14	DIY	449	67350	13609	20%	13470	12697	94%	26	90	26422
15	JATIM	5950	892500	349026	39%	178500	134228	75%	244	1602	485100
16	BANTEN	677	101550	2530	2%	20310	103	1%	1	6	2640
17	BALI	726	108900	16978	16%	21780	963	4%	21	38	18000
18	NTB	1166	174900	94447	54%	34980	980	3%	63	34	95524
19	NTT	857	128550	1725	1%	25710	37	0%	10	3	1775
20	KALBAR	917	137550	64824	47%	27510	3085	11%	61	118	68088
21	KALTENG	680	102000	17366	17%	20400	622	3%	34	93	18115
22	KALSEL	881	132150	42824	32%	26430	17748	67%	28	43	60643
23	KALTIM	521	78150	2764	4%	15630	312	2%	21	58	3155

NO	POLDA	JML BHABIN	DDS Min. 5 Giat (5 rumah)/hari * 30 Hari			DETEKSI DINI Min. 1 Laporan/hari * 30 Hari			PROBLEM SOLVING 1	PROBLEM SOLVING 2	JUMLAH GIAT
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%			
24	KALTARA	191	28650	2431	8%	5730	454	8%	3	1	2889
25	SULUT	391	58650	2451	4%	11730	4	0%	17	6	2478
26	SULTENG	1070	160500	7627	5%	32100	614	2%	22	2	8265
27	SULSEL	1473	220950	44710	20%	44190	3574	8%	90	22	48396
28	SULTRA	610	91500	10139	11%	18300	779	4%	21	54	10993
29	GORONTALO	335	50250	1333	3%	10050	0	0%	0	1	1334
30	SULBAR	322	48300	1891	4%	9660	178	2%	21	4	2094
31	MALUKU	621	93150	6320	7%	18630	1889	10%	100	45	8354
32	MALUT	373	55950	10291	18%	11190	344	3%	61	0	10696
33	PAPUA	1054	158100	3097	2%	31620	78	0%	17	6	3198
34	PAPUA BARAT	358	53700	405	1%	10740	0	0%	0	0	405
TOTAL		38.707		1546.602			289.619		1.528	6.407	1.844.156

Sumber : Subdit Bhabinkamtibmas Februari 2024

Besarnya peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung fungsi Polri dalam pelayanan masyarakat belum mendapatkan *feedback* yang maksimal dari masyarakat sebagai SDM unggul. Dari analisis berita dan media sosial

program *Quick Win* Triwulan IV tahun 2023 yang dilakukan MediaWave periode : 21 November sampai dengan 31 Desember 2023 menyebutkan dari 247 percakapan, sebesar 63,70 % memberikan sentimen negatif terhadap keberhasilan polri membangun SDM unggul. Hal ini menandakan masyarakat belum yakin bahwa Polri sudah menempatkan personel yang kompeten melalui SDM unggul dalam melayani publik.

Pasal 15 huruf C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib menempatkan personel yang kompeten. Sertifikasi berperan penting dalam menjamin bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki kompetensi sesuai standar, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 huruf C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan sertifikasi, kualitas dan profesionalisme pelayanan dapat dijaga, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, sertifikasi memudahkan organisasi untuk memastikan akuntabilitas pelaksana, serta mendorong mereka untuk terus mengikuti standar dan perkembangan terbaru di bidangnya, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab. Hal tersebut tentunya berlaku pula untuk Polri yang wajib menempatkan personelnnya yang kompeten dalam melayani masyarakat.

Menurut (Cumberland et al., 2018) Sertifikasi memiliki peran penting dalam peningkatan kompetensi individu, pengakuan profesional, dan daya saing di pasar kerja. Dengan sertifikasi, individu dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperlukan, memperoleh pengakuan dan kredibilitas di bidangnya, serta memperluas jaringan profesional. Selain itu, sertifikasi sering kali menjadi nilai tambah atau bahkan syarat utama dalam beberapa profesi, membantu individu dalam pengembangan karier dan memperkuat posisi di lingkungan kerja yang kompetitif.

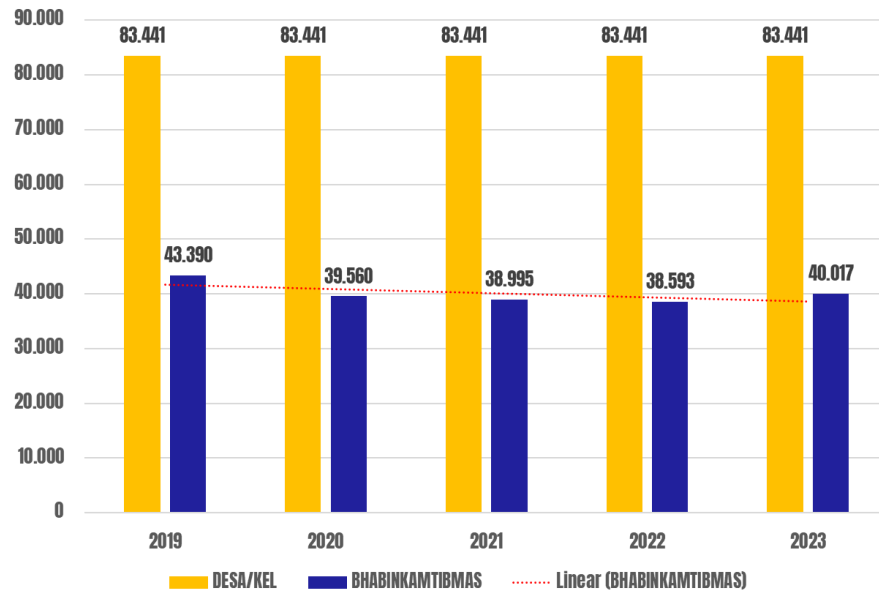
Menurut (Development, 2004) dalam penelitian yang berjudul *Professional Certification Its Value To SH&E Practitioners And The Profession* pada tahun 2004 menyebutkan salah satu cara paling signifikan mendapatkan pengakuan dalam karier yang dipilih adalah melalui sertifikasi. Sertifikasi dan kompetensi berdampak signifikan terhadap kinerja (Ratnasari Sri Langgeng, Susanti Ervin Nora, Ismanto Widodo, Tanjung Rona, 2022)

Menjawab permasalahan tersebut, desain pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas melalui sertifikasi dapat menjadi solusi yang efektif. Sertifikasi memberikan standar baku yang harus dicapai oleh setiap Bhabinkamtibmas, sehingga dapat meminimalisir perbedaan kualitas SDM di berbagai wilayah kerja. Selain itu, sertifikasi juga berfungsi sebagai motivasi bagi personel untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi. Dengan adanya sertifikasi, Korbinmas Baharkam Polri dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan pengembangan Bhabinkamtibmas dan memetakan karier berdasarkan kompetensi yang telah tersertifikasi.

Untuk memperoleh gambaran tentang pentingnya desain pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas melalui sertifikasi, digambarkan kondisi Bhabinkamtibmas dan digali terkait potensi pentingnya desain pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas melalui sertifikasi. Subdit Bhabinkamtibmas Korbinmas Baharkam Polri yang menjadi lokus penelitian merupakan pembina dan perumus kebijakan bagi Bhabinkamtibmas pada Tingkat Mabes Polri.

Gambar 1.1

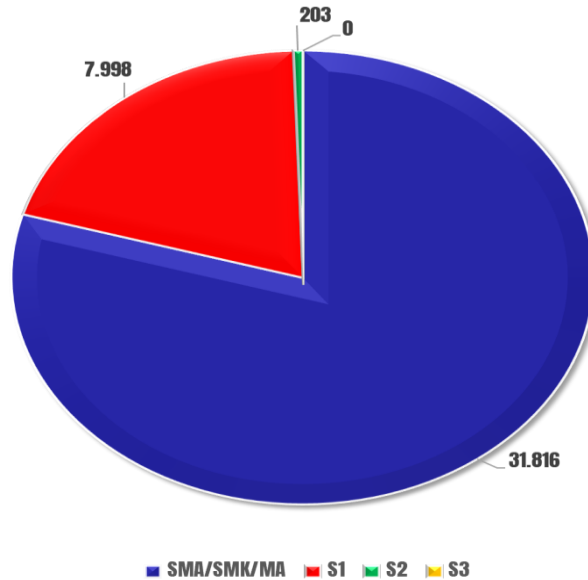
Perbandingan Jumlah Bhabinkamtibmas dengan Desa/Kelurahan



Sumber : Subdit Bhabinkamtibmas 2024

Dari hasil analisa dan evaluasi Subdit Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri tahun 2023 menyebutkan pada tahun 2023 jumlah Bhabinkamtibmas sebanyak 40.017 personel dengan jumlah desa/kelurahan yang harus ditangani sebanyak 83.589 desa/kelurahan artinya pemenuhan ini baru sebanyak 47,9 %. Dapat dikatakan 1 orang bhabinkamtibmas harus bisa menangani minimal 2 desa/kelurahan sebagai desa binaanya. Dengan target kinerja yang demikian besar namun jumlah Bhabinkamitbmas yang ada sangat jauh dari ideal ditambah karakteristik setiap warga baik dari pendidikan, suku, dan ekonomi bisa membuat tata cara komunikasi yang berbeda pula, untuk itu seorang Bhabinkamtibmas harus kompeten sehingga dapat meningkatkan kinerjanya secara efektif dan efisien menuju SDM unggul.

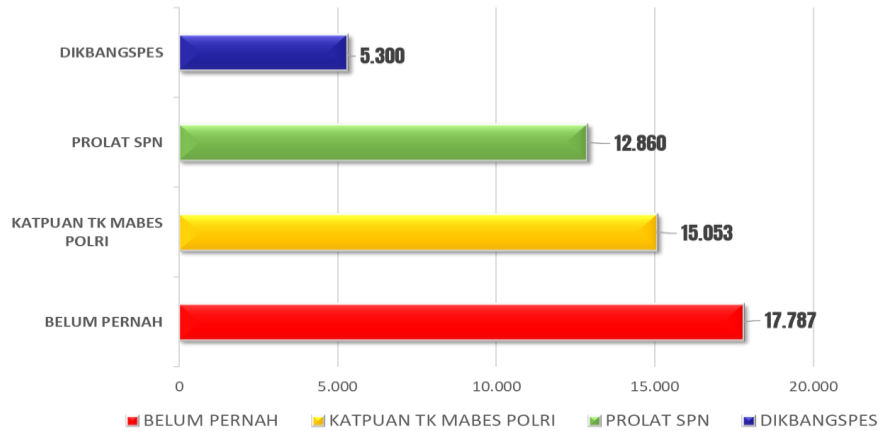
Gambar 1.2
Pendidikan Umum Bhabinkamtibmas



Sumber : Subdit Bhabinkamtibmas 2024

Dari data tersebut, Sebanyak 79.5% Bhabinkamtibmas yang berasal dari lulusan SMA/SMK/MA dan 20% yang S1 dan 0.5% yang S2. Melihat bahwa mayoritas Pendidikan Bhabinkamtibmas berada pada Tingkat Pendidikan menengah, sehingga Bhabinkamtibmas perlu diberikan pelatihan lebih lanjut agar dapat membantu Masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara optimal. Karena itu Subdit Bhabinkamtibmas melaksanakan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes), Program Pelatihan Polri (Prolat), dan Pelatihan Peningkatan Kemampuan (Katpuan) baik di tingkat Mabes Polri maupun di di tingkat Polda dalam upaya mencetak SDM Bhabinkamtibmas unggul.

Gambar 1.3
Program Pendidikan dan Pelatihan Bhabinkamtibmas

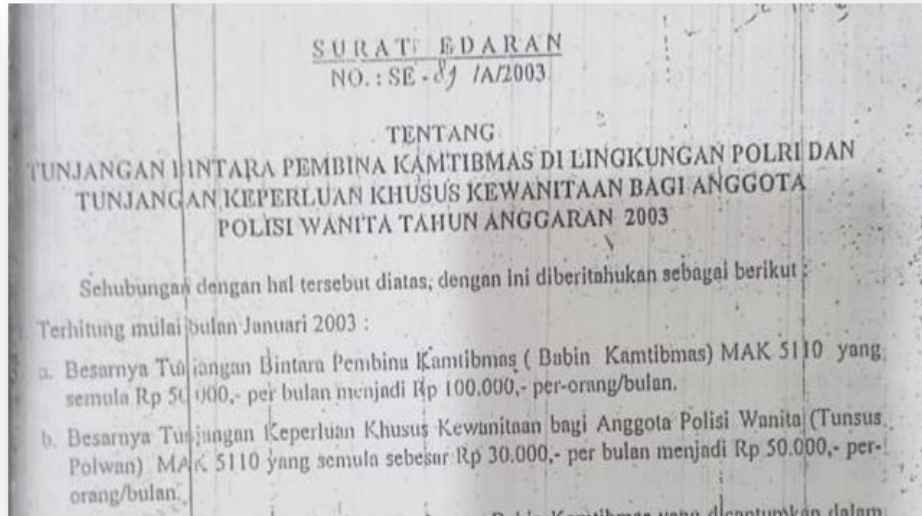


Sumber : Subdit Bhabinkamtibmas 2024

Dari gambar diatas menunjukan dari jumlah total Bhabinkamtibmas yang ada sebanyak 40.017 orang, sebanyak 17.787 Bhabinkamtibmas (44.44%) belum pernah mengikuti program pendidikan dan pelatihan apapun. Sebanyak 6.541 Bhabinkamtibmas (16.35%) mengikuti katpuan tingkat Mabes Polri. Mengikuti Prolat SPN sebanyak 12.860 Bhabinkamtibmas (32.14%). Dan Dikbangspes sebanyak 5.300 Bhabinkamtibmas (13.25%).

Menurut statistik tersebut, sejumlah besar Bhabinkamtibmas belum pernah mengikuti Dikbangspes Binmas, Prolat di SPN dan Katpuan TK Mabes Polri sehingga perlu dilakukan upaya dan Langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Minat dari Bhabinkamtibmas sendiri juga masih tergolong rendah dalam mengikuti pendidikan dikarenakan dirasa belum ada manfaatnya untuk pengembangan karier bagi Bhabinkamtibmas itu sendiri. Motivasi kerja dan pengembangan karir keduanya meningkatkan produktivitas (Ni Luh, dkk., 2016).

Gambar 1.4
Tunjangan Khusus Bhabinkamtibmas



Sumber : Subdit Bhabinkamtibmas 2024

Sesuai Surat Edaran No:SE-89/A/2003 Tentang Bintara Pembina Kamtibmas di Lingkungan Polri dan Tunjangan Keperluan Khusus Kewanitaan dijelaskan bahwa besarnya tunjangan Bintara Kamtibmas yang semula 50.000 /orang/bulan menjadi 100.000 /orang/bulan. Dengan beban pekerjaan yang banyak, dan personel yang terbatas Bhabinkamtibmas hanya memperoleh tunjangan khusus sebesar 100.000 per bulan sejak 21 tahun lalu belum ada kenaikan. Hal ini dikarenakan Bhabinkamtibmas saat ini merupakan salah satu fungsi Polri yaitu pembinaan masyarakat, bukan merupakan suatu keahlian khusus ataupun sebuah jabatan fungsional yang dapat diberikan tunjangan jabatan maupun tunjangan keahlian. Peraturan Presiden Nomor 42/2017 Pasal 10 huruf F menyebutkan persyaratan pembentukan jabatan fungsional anggota Polri adalah memiliki sertifikat kompetensi.

Dari permasalahan tersebut, Subdit Bhabinkamtibmas perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mendesain pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas. Desain ini bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan yang ada, seperti kesenjangan kompetensi di lapangan, kurangnya pengakuan formal terhadap kompetensi, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja Bhabinkamtibmas dan juga sebagai upaya bahwa penerapan sertifikasi sebagai standar baku untuk mengukur dan meningkatkan kompetensi, yang juga akan berfungsi sebagai motivasi bagi personel untuk terus mengembangkan diri. Selain itu, sertifikasi dapat membantu memetakan karier Bhabinkamtibmas melalui jabatan fungsional, sehingga Polri dapat memastikan bahwa setiap personel ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan, selaras dengan program prioritas Kapolri dalam menciptakan SDM Polri yang unggul.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan desain skema sertifikasi dalam upaya pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas agar terwujud SDM Polri unggul.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut identifikasi masalah yang terjadi karena belum adanya sertifikasi Bhabinkamtibmas adalah :

1. Pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas melalui pendidikan dan pelatihan belum memadai.
2. Kesenjangan kompetensi Bhabinkamtibmas di kewilayahan, di mana kompetensi tidak terukur dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Kurangnya pengakuan dari masyarakat terhadap kompetensi dan profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam memberikan layanan publik.

4. Sertifikasi dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar profesional dalam pelayanan publik, serta sebagai dasar pembentukan jabatan fungsional.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana skema sertifikasi Bhabinkamtibmas?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun skema sertifikasi Bhabinkamtibmas.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya Satuan Kerja Korbinmas Baharkam Polri dengan adanya skema sertifikasi Bhabinkamtibmas guna kepentingan pengembangan Kompetensi.